

Pemberangkatan

Menurutnya, sesuai amanat undang-undang, selain kemampuan ekonomi dan fisik, keselamatan dan keamanan jemaah haji harus diutamakan, yaitu sejak dari embarkasi dalam perjalanan dan di Arab Saudi. "Sungguh ini keputusan pahit dan sulit. Di satu sisi kita sudah upaya bersama untuk menyiapkan penyelenggaraan haji tahun ini sebagai tugas pembinaan dan pelayanan. Tapi, di sisi lain kita punya tanggung jawab perlindungan bagi jemaah dan petugas haji. Ini tugas negara untuk menjamin keselamatan warganya," kata Menag.

Menurut Menag, keputusan itu sudah melalui kajian mendalam. Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Agama sendiri mengajarkan, menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan.

Kemenag telah melakukan kajian literatur serta menghimpun sejumlah data dan informasi tentang haji di saat pandemi di masa-masa lalu. Didapatkan fakta, penyelenggaraan ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular, telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan di mana puluhan ribu jemaah haji menjadi korban. Tahun 1814 misalnya, saat terjadi wabah Thau, tahun 1837 dan 1858 terjadi wabah epidemii, 1892 wabah kolera, 1987 wabah meningitis. Pada 1947, Menag Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan Maklumat Kemenag No 4/1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang.

"Waktu terus berjalan dan semakin mepet. Rencana awal kita, keberangkatan kloter pertama 26 Juni. Artinya, untuk persiapan terkait visa, penerbangan, dan layanan di Saudi tinggal beberapa hari lagi. Belum ditambah keharusan karantina 14 hari sebelum keberangkatan dan saat kedatangan. Padahal, akses layanan dari Saudi hingga saat ini belum ada kejelasan kapan mulai dibuka," tuturnya.

Jika jemaah haji dipaksakan berangkat, ada risiko amat besar yaitu menyangkut keselamatan jiwa dan kesulitan ibadah. Meski dipaksakan pun tidak mungkin karena Arab Saudi tak kunjung membuka akses. Seiring keluarnya kebijakan pembatalan keberangkatan jemaah ini, jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Biph) tahun ini akan menjadi jemaah haji 1442 H/2021 M.

Setoran pelunasan Biph yang dibayarkan akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). "Setoran pelunasan Biph juga dapat diminta kembali oleh jemaah haji," tambahnya.

Bersamaan dengan terbitnya Keputusan Menag ini, lanjutnya , Petugas Haji Daerah (PHD) pada penyelenggaraan ibadah haji

tahun ini dinyatakan batal. Biph yang telah dibayarkan akan dikembalikan. "Gubernur dapat mengusulkan kembali nama PHD pada haji tahun depan," katanya.

Hal sama berlaku bagi pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) pada penyelenggaraan haji tahun ini. Statusnya dinyatakan batal. Biph yang dibayarkan akan dikembalikan. KBIHU dapat mengusulkan nama pembimbing pada penyelenggaraan haji mendatang. "Semua paspor Jemaah haji, petugas haji daerah, dan pembimbing dari unsur KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M akan dikembalikan kepada pemilik masing-masing," ucapnya.

Menyikapi pembatalan pemberangkatan haji tahun 2020, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta para calon haji untuk menerima. Pasalnya kebijakan tersebut diambil setelah melewati banyak pertimbangan. "Saya kira keadaan atau kondisi seperti sekarang ini harus dimaklumi. Toh dalam daftar kan tidak mengalami perubahan. Karena yang tahun ini batal untuk berangkat ke tanah suci pasti akan diprioritaskan untuk berangkat tahun depan," kata Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, kemarin.

Kakanwil Kemenag DIY, Drs H Edhi Gunawan MPdI didampingi Kabag Tata Usaha M Wahib Jamil menjelaskan, jemaah yang telah melunasi Biph menjadi Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) tahun 1442 H/2021 M. Namun, jemaah dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran lunas Biph. "Hal ini berlaku baik jemaah haji reguler maupun khusus," jelasnya.

Sedang Pembimbing Haji Daerah dan Pembimbing dari unsur KBIHU statusnya dibatalkan dan dapat diajukan kembali untuk tahun 1442/2021 sesuai ketentuan perundangan. Ditambahkan, jemaah yang telah dinyatakan mampu (*istitha'ah*), pemeriksaan kesehatan haji untuk keberangkatan tahun 1442/2021 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Terkait Perlengkapan Jemaah dan PPIH, gelang identitas akan dipergunakan untuk keberangkatan haji tahun 1442/2021, sementara jemaah yang sudah menerima buku manasik, perlengkapan dari BPS Biph tidak diberikan lagi untuk keberangkatan tahun 1442/2021. Selain itu, Perlengkapan Petugas PIH tahun 1441/2020 akan dipergunakan untuk tahun 1442/2021.

Untuk dokumen haji, Kemenag akan mengembalikan paspor kepada masing-masing jemaah, Petugas Haji Daerah dan Pembimbing Ibadah dari unsur KBIHU melalui Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Untuk bimbingan manasik haji, pemerintah akan memberi bimbingan manasik haji kepada jemaah haji reguler. Sedang PIHK memberi bimbingan manasik kepada je-

Sambungan hal 1

maah haji khusus dan KBIHU memberikan bimbingan manasik kembali walaupun telah mendapatkan bimbingan tahun 2020. Terpisah Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DIY Agusnur Budiarno menegaskan, DIY memiliki kuota 3.147 calon jemaah haji dengan rincian calon haji murni 3.116 orang dan sisanya petugas daerah dan pendamping saat menjalani ibadah haji.

"Seluruh pemberangkatan haji mundur menjadi 2021. Jadi kami masih melakukan sosialisasi kepada calon jemaah. Kalau mundur, pemberangkatan tetap Juni 2021 tetapi maju 10 hari, jadi jika sekarang seharusnya berangkat 26 Juni maka tahun depan mungkin 16 Juni," ujar Agusnur.

Agusnur mengungkapkan, pihaknya memberikan dua opsi kepada calon jemaah haji, yaitu apabila tetap menunggu, masuk daftar tunggu dan berangkat 2021 atau menarik seluruh uang pendaftaran. Jika memilih menunggu ada sejumlah catatan mulai dari kemungkinan perubahan biaya pendaftaran haji. Sementara untuk sejumlah persyaratan ada dispensasi seperti tidak ada pengajuan kembali keterangan lanjut usia.

Biaya haji Rp 35.972.602 untuk pemberangkatan dari embarkasi haji Solo. Apabila yang masuk daftar tunggu, sudah membayar Rp 25 juta, maka tinggal membayar kekurangannya. Sebaliknya jika biayanya turun akan ditransfer kelebihanannya ke rekening calon jemaah.

Sebanyak 254 jemaah calon haji dari Kabupaten Kulonprogo tahun ini batal berangkat menyusul adanya Keputusan Menag tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.

Hal itu dikatakan Kepala Kemenag Kulonprogo H Ahmad Fauzi SH. "Semua demi keselamatan umat karena kondisi pandemi Covid-19. Dijelaskan Fauzi, jumlah pelunasan 254 orang terdiri tahap 1 sebanyak 221 orang dan tahap 2 ada 33 orang. Dengan keluarnya kebijakan pembatalan keberangkatan ini, jemaah yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji 2020 menjadi calon jemaah haji 2021.

Muhammadiyah menilai keputusan pemerintah tentang pembatalan haji 1441 H merupakan langkah yang tepat. Secara syariah keputusan pembatalan haji tahun ini juga tidak melanggar. Karena di antara syarat haji itu, selain mampu secara ekonomi, kesehatan, mental dan agama, juga aman selama perjalanan.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Dr Abdul Mu'ti mengemukakan hal tersebut kepada media, Selasa (2/6). Hal tersebut disampaikan terkait pengumuman Menag yang telah memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2020.

(Fie/Ria/IraWid/Fsy/Ati)-d

Wisatawan

pelaksanaan tatanan baru di DIY bisa berjalan dengan baik," tutur Wakil Ketua Umum Kadin DIY Gonang Djuliastono sebagai induk organisasi dunia usaha dan industri di DIY usai bersilaturahmi dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Bangsal Kepatihan, Selasa (2/6).

Gonang mengatakan pelaksanaan tatanan baru tersebut harus ada SOP protokol kesehatan di masing-masing dunia usaha dan industri serta di lapisan masyarakat, dan harus se-

Dompet

Melalui Transfer

412	Agus Kalasan	500,000.00
413	Fenty Puspitasari	50,000.00
414	Astrid Hendrika	105,000.00
415	Novendra Avighana	300,000.00
JUMLAH		Rp 955,000.00
JUMLAH		Rp 4,703,000.00

s/d 30 Mei 2020	Rp 261,975,026.00
s/d 02 Juni 2020	Rp 266,678,026.00

(Dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah)-d

Ujian

Selama ini, berbagai kegiatan akademik di UGM berlangsung kondusif. Tak ada masalah dengan substansi ilmu yang diseminarkan. Topik apapun layak dan sah diseminarkan. Komitmen mahasiswa dan dosen-dosen terhadap pertemuan-pertemuan ilmiah, terus didorong, difasilitasi, dan diapresiasi.

Perlu dipahami, bahwa cakupan ilmu itu sedemikian luas. Tak terbatas. Objek ilmu adalah semua realitas, di bumi dan di langit, bahkan di antara keduanya. Seluruhnya, perlu digarap, dipahami, dan diambil manfaatnya. Demi kemashalatan bersama. Sejujurnya, betapapun banyak fakultasnya, UGM belum mampu menggarap keseluruhan objek-objek tersebut. Topik-topik kenegaraan, masih sedemikian banyak yang perlu diseminarkan. Sivitas akademika perlu didorong agar berani mendiskusikan topik-topik yang aktual.

Disadari, permasalahan bangsa dan negara, semakin rumit dan kompleks. Perlu ilmu mutakhir sebagai sarana penyelesaian. Agar kehidupan bernegara setiap demi setiap maju. Muaranya, kemakmuran dan keadilan dapat dirasakan bersama.

Tragis, kondusivitas iklim akademik Fakultas Hukum UGM, tiba-tiba terkoyak, tercedera. Seseorang berpasangka bu-

ruk terhadap webinar yang akan diselenggarakan komunitas mahasiswa *Constitutional Law Society* (CLS). Judul webinar dimasalahkan. Bahkan dikaitkaitkan dengan gerakan makar.

Agar kondusivitas iklim akademik kembali sejuk, atas kesadaran dan toleransi tinggi, judul diubah. Tertulis jelas dalam TOR, ruang-lingkup pembahasan, hanya dari aspek yuridis-normatif. Bukan kajian politik praktis. Jadi, webinar mirip-mirip kuliah online. Substansinya aktual. Calon narasumbernya kompeten di bidangnya. Bagus kan?!

Apa mau dikata. Tuduhan terhadap webinar sebagai égerakan makari, telah viral. Bak siraman bensin pada rumput kering. Mereka yang telah terjangkiti penyakit iri-dengki, arogan, dangkal pemikiran, secepat kilat tersulut. Teror, gedorgedor pintu rumah, ancaman pembunuhan dialamatkan ke narasumber, mahasiswa bahkan hingga orangtuanya. Demi keamanan, tidak masalah webinar dibatalkan. Perlu evaluasi diri. Dicari, hikmah di balik kasus ini.

Pertama, ada peran antagonis dimainkan seseorang. Tak paham dan tak memiliki ilmu hukum cukup, tetapi lantang membuat pernyataan bombastis nir-akademik. Kedua, iklim akademik rentan menjadi rusak, ketika

Sambungan hal 1

digoyang-goyang politik praktis. Ilmu politik, walaupun otentiknya bagus, luhur, elegan, ternyata dipraktikkan secara kasar nir-etika. Benarkah, oknum-oknum politisi bermain di balik teror ala prenamisme ini? Jangankan publik berspekulasi. Tak mudah pembuktian. Di tangan aparat negara, terserah, apakah oknum-oknum ditangkap ataukah dibiarkan berkeliraran.

Ketiga, begitu banyak kontribusi UGM terhadap negara. UGM berani mengusulkan suksesi kepemimpinan nasional di era Orde Baru. Dokumen 'GBHN dan Pembangunan Nasional Jangka Panjang tahap Kedua, 1993-1998' adalah karya Tim 9 UGM. Sejumlah persoalan sensitif berani dikemukakan, antara lain: (1) pembatasan masa jabatan presiden; (2) dwifungsi ABRI; (3) demokrasi ekonomi/ekonomi Pancasila; (4) gagasan reforma agraria; (5) perlunya desentralisasi; (6) pembatasan utang luar negeri; (7) korupsi. Sikap akademik serupa perlu dilanjutkan, diaktualisasikan, selaras perkembangan zaman.

Saya yakin. Ke depan, sivitas akademika UGM semakin dewasa, arif, dan bijak dalam merespons segala permasalahan. Demi kejayaan Indonesia.

(Penulis adalah Guru Besar Ilmu Hukum UGM)-d

LION AIR KEMBALI STOP OPERASI

Penumpang Tak Paham Aturan

JAKARTA (KR) - Lion Air Group menghentikan sementara operasional penerbangan penumpang berjadwal domestik dan internasional. Stop operasi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 ini, diadwalkan mulai 5 Juni hingga pemberitahuan lebih lanjut (*until further notice / UFN*).

Keputusan Lion Air Group tersebut dilakukan dengan pertimbangan atas evaluasi setiap pelaksanaan operasional penerbangan sebelumnya, dimana banyak calon penumpang yang tidak dapat melaksanakan perjalanan udara disebabkan kurang memenuhi kelengkapan dokumen-dokumen. "Mereka tidak bisa melengkapi dokumen sebagaimana persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan selama masa kewaspadaan pandemi Covid-19," ungkap Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro di Jakarta, Selasa (2/6).

Atas kebijakan penghentian sementara operasional ini, kata Danang, Lion Air Group memfasilitasi kepada calon

penumpang yang sudah memiliki atau membeli tiket dapat melakukan proses pengembalian dana tanpa potongan (*full refund*) atau perubahan jadwal keberangkatan tanpa tambahan biaya. "Bagi yang mau *refund* atau mengubah jadwal dapat dilakukan melalui kantor pusat dan kantor cabang penjualan tiket Lion Air Group di seluruh kota di Indonesia," jelasnya.

Danang menambahkan, Lion Air Group akan terus memantau perkembangan situasi, mengumpulkan data dan informasi serta mengimplementasikan berbagai langkah antisipasi yang dibutuhkan guna mempersiapkan kembali layanan penerbangan mendatang. Dengan demikian, operasional penerbangan Lion Air Group tetap berjalan berdasarkan ketentuan berlaku yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan perjalanan udara, dan tetap melakukan protokol kesehatan sesuai ketentuan serta tidak menyebabkan penyebaran Covid-19.

(lmd)-f

IMUNISASI DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Hanya Dilakukan pada Anak yang Sehat

JAKARTA (KR) - Imunisasi anak di tengah pandemi Covid-19 harus dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat, dan hanya dilakukan kepada anak yang sehat.

"Perubahan yang pasti, bagaimana protokol kesehatan tetap dilaksanakan dalam pelayanan imunisasi. Kalau selama ini bisa tanpa alat pelindung diri (APD), tapi sekarang untuk petugas sudah harus menggunakan masker bedah," kata Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemendes) drg R Vensya Sitohang MEpid dalam Diskusi 'Imunisasi Anak di Tengah Pandemi' di Jakarta, Selasa (2/6).

Namun demikian, kata Vensya Sitohang, ada saat petugas harus berada dalam jarak yang dekat dengan anak maka proses penyuntikan atau pemberian

penetesan harus dilakukan dalam waktu secepat mungkin.

Fenomena baru di fasilitas layanan kesehatan juga berupa triase atau pemisahan anak sehat dan sakit sudah harus dilakukan lebih awal. Jika tidak dikondisikan dengan baik oleh petugas kesehatan, akan berdampak kepada ketakutan oleh orangtua untuk membawa anaknya menjalani imunisasi.

"Walau tidak ada jaminan, ada upaya kita untuk memberikan perlindungan kepada orangtua dan anak yang sehat untuk mendapatkan imunisasi," kata Vensya. Terkait imunisasi anak di tengah pandemi, akan diperlukan kerja sama berbagai pihak untuk menyukseskannya, kata Sekretaris II Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Catherine M Sambo.

(Ati)-d

BUNTUT RENCANA DISKUSI DARING

Guru Besar UII Laporkan Dosen UGM ke Polda

SLEMAN (KR) - Guru besar Hukum Tata Negara UII, Prof Nimatul Huda melaporkan dosen UGM Bagas Pujilaksono Widyakanigara ke Mapolda DIY, Selasa (2/6) atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Bagas dalam pernyataan terbukanya beberapa waktu lalu menuding diskusi daring mahasiswa Fakultas Hukum UGM dengan tema awal 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan' yang kemudian diubah menjadi "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" merupakan tin-

dakan makar.

Nimatul didampingi 31 pengacara dalam laporannya ke Mapolda DIY siang ini. Mereka seluruhnya berasal dari Advokat Akademisi (dosen yang advokat), LKBH UII dan Forum Advokat Alumni FH UII.

Mukmin Zaki, salah satu kuasa hukum Nimatul Huda mengatakan ada dua bagian pelaporan kali ini yakni kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan dosen UGM Bagas Pujilaksono serta aksi teror melalui pesan aplikasi Whatsapp dan teror langsung di kediaman Prof Nimatul Huda.

(Fxb)-f

Sejak

Akibat pandemi ini kami tutup semua dagangan karena semua orang takut bertemu orang dan membeli. Kami bertahan hidup dari bantuan dan mengambil sedikit demi sedikit tabungan kami," keluhnya.

Dengan adanya bantuan dari pembaca *KR* ia mengucapkan terima kasih kepada pembaca dan SKH KR yang telah peduli dengan komunitas ini. "Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami. Mudah-mudahan *KR* semakin jaya dan semakin peduli kepada kaum disabilitas, khususnya yang ada di Yogyakarta," kata Sumadi.

Senada, Ratnarningsih (39) mengaku bantuan pembaca *KR* sangat berarti bagi dirinya dan komunitasnya yang rata-rata merupakan penyandang disabilitas tunadaksa dan tunane-

Tersangka

"Sekarang KPK melakukan penahanan dua tersangka tersebut selama 20 hari terhitung sejak 2 Juni sampai dengan 21 Juni 2020 masing-masing di Rumah Tahanan KPK Kavling C1 (berlokasi di gedung KPK lama)," jelasnya saat jumpa pers di Gedung KPK, Selasa (2/6).

Penangkapan kedua tersangka tersebut setelah ditetapkan dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Februari 2020. Jadi, ujar Ghufron, Senin, 1 Juni 2020, tim KPK melakukan penangkapan terhadap tersangka NHD dan RHE. Penyidik KPK setelah memeriksa melakukan penahanan terhadap dua tersangka ini. Saat keluar dari pemeriksaan dua tersangka tersebut bungkam dan langsung menuju mobil tahanan KPK.

Selain Nurhadi dan Rezky, tersangka lainnya dalam kasus itu, yakni Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS) sampai saat ini belum tertangkap. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Desember 2019.

Nurhadi dan Rezky ditetapkan

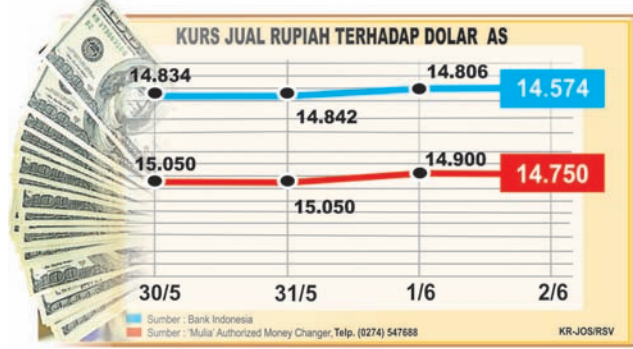
Sambungan hal 1

tra. Dijelaskan, aktivitas ekonomi mereka mulai terhendi sejak awal Maret hingga saat ini.

"Rata-rata penghasilan saya Rp 500 ribu/bulan jika hari normal, kadang lebih kadang kurang. Sekarang kami bertahan dengan mengharapkan bantuan dan tabungan," jelasnya.

Sebelumnya ia rutin menjahit seragam namun saat pandemi tak ada order seragam. Saat ini ia terpaksa menghentikan seluruh aktivitasnya. Namun pada awal Juni ini pihaknya diminta menjahit Alat Pelindung Diri (APD) dan masker. "Bantuan dari pemerintah dan desa yang didistribusikan tidak semua dapat, maka kami berterimakasih kepada pembaca *KR* semoga bermanfaat dan berkah bagi semua," jelasnya.

(Aje)-d



Prakiraan Cuaca				Rabu, 3 Juni 2020		
Lokasi	Cuaca				Suhu °C	Kelembaban
	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari		
Bantul					24-32	65-90
Sleman					23-31	65-90
Wates					24-32	65-90
Wonosari					24-32	65-90
Yogyakarta					24-32	65-90
 Cerah	 Berawan	 Udara Kabur	 Hujan Lokal	 Hujan Petir	Grafis - Arkas	